



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TANTANGAN & PELUANG PROFESI AKTUARIS DI INDONESIA



*The 3rd Indonesian Actuaries Summit
Cirebon, 19 April 2018*

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal
Integritas • Profesionalisme • Sinergi • Pelayanan • Kesempurnaan

AGENDA



Tantangan



Peluang



Pengawasan



WBBM



TANTANGAN



PEMANFAATAN *BIG DATA*

- Membantu perusahaan untuk mengumpulkan data pasar dan membantu menemukan jawaban atas kebutuhan konsumen dan masyarakat.
- Sebagai informasi tentang perilaku konsumen sehingga konsumen dapat memperbaiki, mempengaruhi, dan mengubah perilaku risiko.
- Sebagai alat untuk mengukur implikasi peristiwa dan mengumpulkan semua data penting, pemodelan faktor risiko, dan membuat keputusan secara real time.

Permasalahan data:

- Rekapitulasi pencatatan klaim kurang lengkap
- Standar pencatatan data tidak sama antar perusahaan
- Sistem pengumpulan data masih kurang baik, teknologi penyimpanan belum memadai

Contoh :

Beberapa perusahaan Asuransi melakukan pencatatan klaim kurang lengkap, bahkan beberapa rinci tidak masuk *database* klaim perusahaan Asuransi

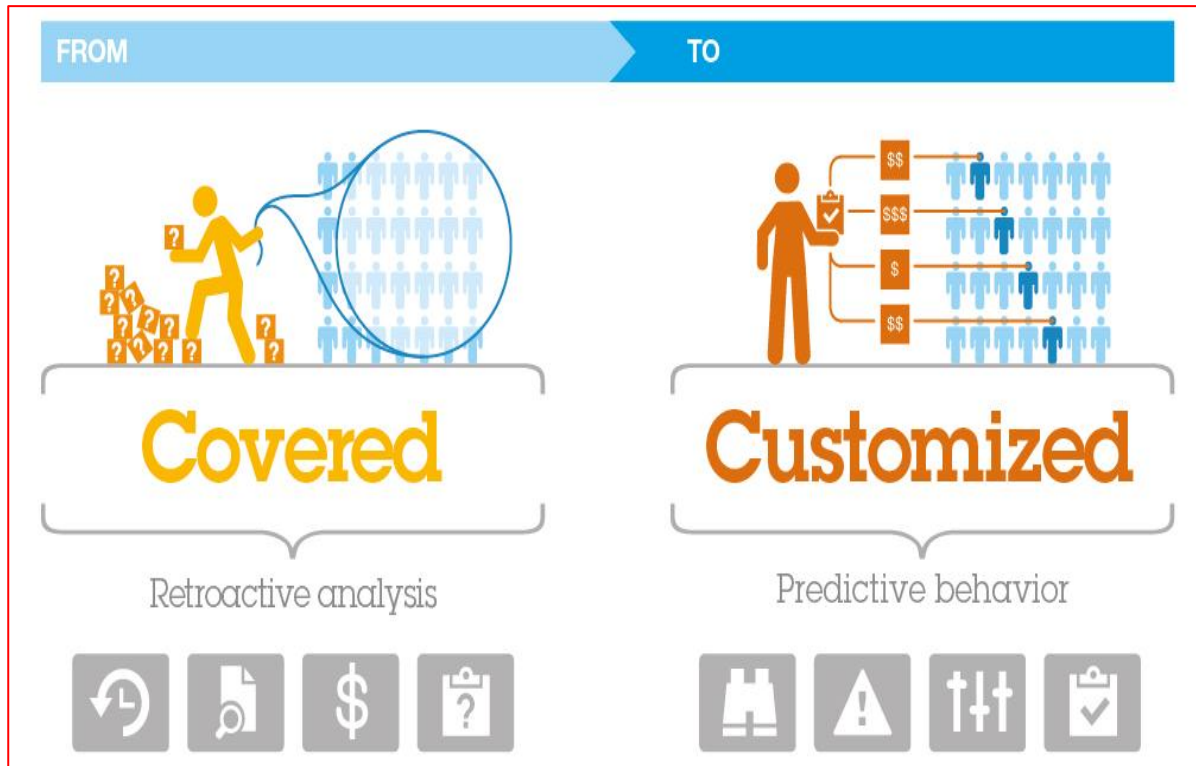


Keahlian tambahan yang dibutuhkan:

1. Kemampuan komputasi yang baik
2. Komunikasi bisnis



PRODUK ASURANSI



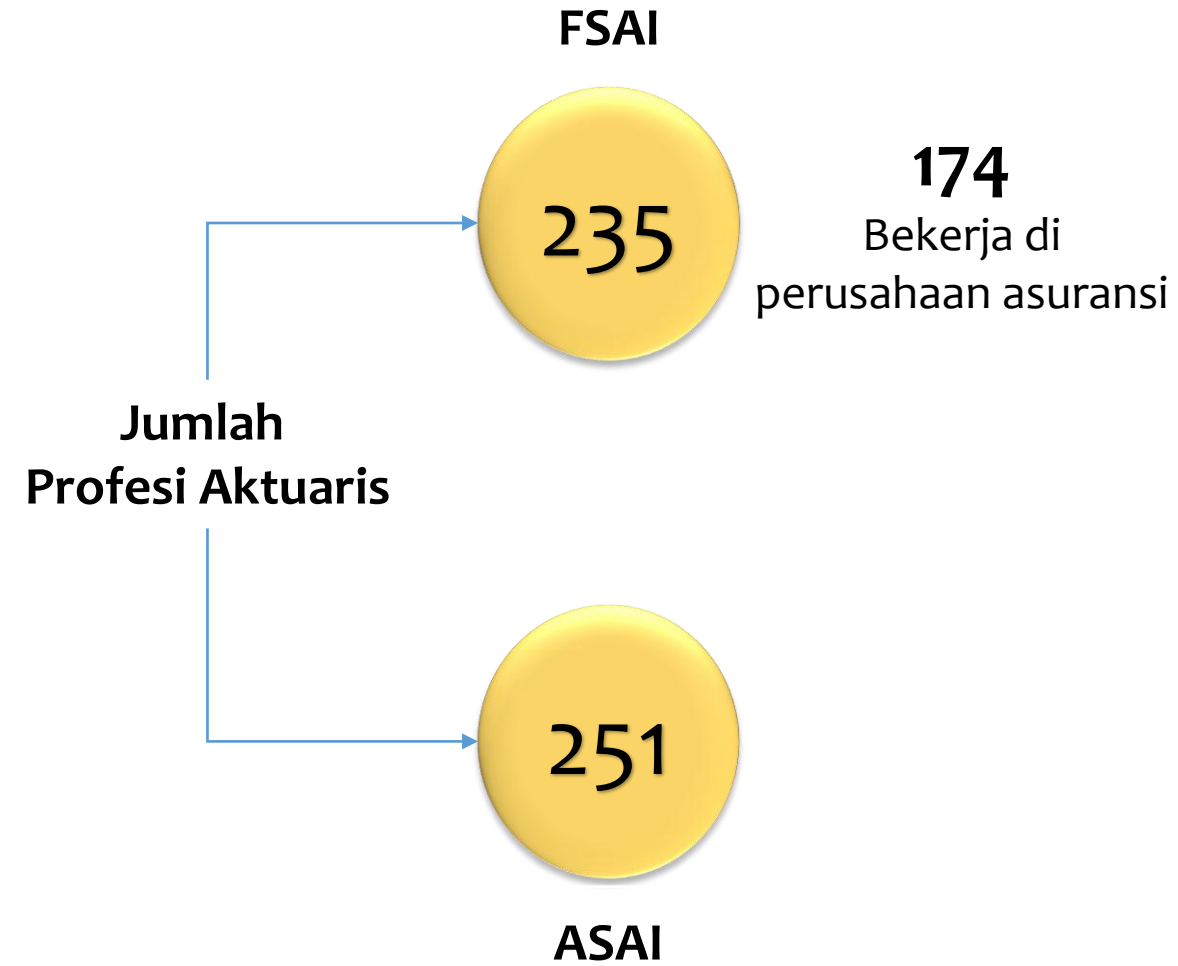
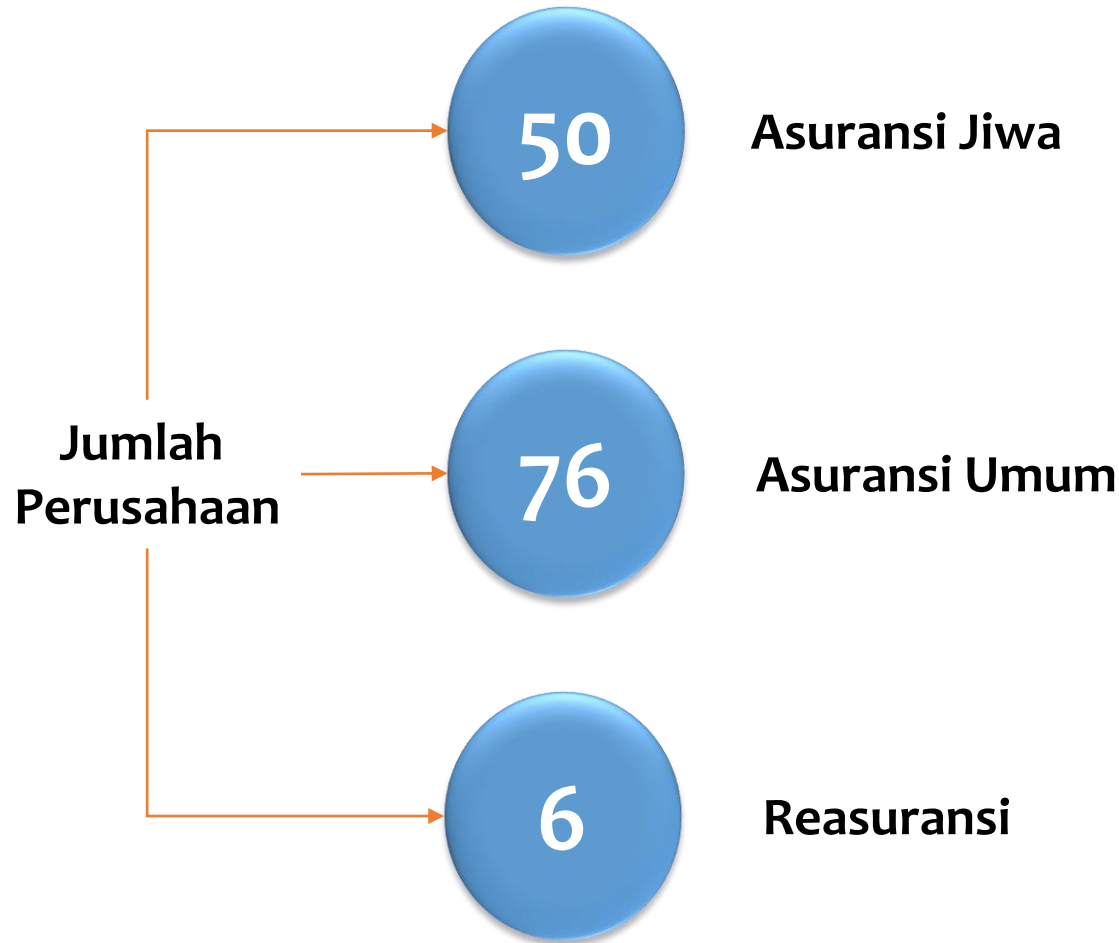
Produk asuransi saat ini cenderung menyeragamkan tingkat risiko klien, kenyataanya tingkat risiko klien berbeda-beda

Diperlukan suatu produk asuransi yang dapat mencerminkan tingkat risiko dari masing-masing klien

Premi menyesuaikan dengan profil tingkat risiko yang ditanggung



PEMENUHAN AKTUARIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI



PEMENUHAN AKTUARIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI

Berdasarkan POJK No.71/POJK.05/2016, perusahaan asuransi wajib memiliki aktuaris

Data Otoritas Jasa Keuangan per Januari 2018, **48** perusahaan Asuransi Umum belum memiliki tenaga Aktuaris

Perusahaan asuransi yang belum memiliki FSAI harus membuat *action plan* untuk pemenuhan kebutuhan



PENGGUNAAN TABEL MORTALITA

TABEL MORTALITA INDONESIA (TMI-II)			
Usia (x)	Jumlah Awal (lx)	Jumlah Meninggal (dx)	Peluang Kematian (qx)
30	989,770	1,356	1.37
31	988,414	1,374	1.39
32	987,040	1,402	1.42
33	985,638	1,449	1.47
34	984,189	1,525	1.55
35	982,664	1,612	1.64
36	981,052	1,717	1.75
37	979,335	1,841	1.88
38	977,494	1,965	2.01
39	975,529	2,088	2.14
40	973,442	2,210	2.27
41	971,232	2,350	2.42
42	968,882	2,509	2.59
43	966,372	2,706	2.80
44	963,666	2,939	3.05
45	960,727	3,247	3.38
46	957,480	3,629	3.79

PERMASALAHAN :

Indonesia memiliki Tabel Mortalita Indonesia – II, terbit tahun 2011.

Beberapa perusahaan asuransi maupun konsultan aktuaria masih belum menggunakan TMI-II tersebut sebagai acuan asumsi mortalita.

Tabel mortalita yang ada masih secara umum, belum dikelompokkan berdasarkan penyebab kematian.

TANTANGAN :

Pengelompokkan tabel mortalita berdasarkan penyebab kematian dapat membantu menganalisa risiko lebih akurat.

Apakah Aktuaris dapat menyusun Tabel Mortalita yang lebih memenuhi kebutuhan Aktuaris yang bekerja pada perusahaan asuransi maupun konsultan aktuaria?



PELUANG



ASURANSI BARANG MILIK NEGARA (BMN)

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 247/PMK.06/2016, Pemerintah mencanangkan Pengasuransian Barang Milik Negara
- BMN yang dapat diasuransikan adalah berupa:
 - Gedung & Bangunan
 - Jembatan
 - Alat angkutan darat/ apung/udara bermotor
 - BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang
- Nilai aset (revaluasi sementara 38%) mencapai Rp. 2,100 Triliun, potensi peningkatan 3 kali lipat
- Aktuaris diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam tahap perencanaan, untuk menentukan tingkat risiko dan alokasi premi yang harus disiapkan

Sumber: <http://finansial.bisnis.com/read/20180201/9/733012/asuransi-barang-milik-negara-pemerintah-masih-lakukan-revaluasi-aset>



BEBERAPA STANDAR/ PERATURAN YANG MENUGASKAN UNTUK MENGGUNAKAN JASA AKTUARIS

Asuransi

- POJK No. 71/POJK.05/2016
- POJK No. 72/POJK.05/2016
Melakukan perhitungan cadangan teknis perusahaan asuransi
- PSAK 62, PSAK 28, PSAK 36
Mengenai Kontrak Asuransi
- POJK No. 23/POJK.05/2015
Merancang produk asuransi (termasuk tarif premi dan profitabilitas)
- POJK No. 14/POJK.05/2015
Revaluasi aspek aktuarial dalam proses reasuransi



Imbalan Kerja & Dana Pensiun

- PSAK 24 Rev. 2013 – Perhitungan Imbalan Pasca Kerja
- Undang-Undang No.11 Tahun 1992 – Kewajiban laporan aktuaris
- PSAK 18 – Akuntansi & Pelaporan Program Manfaat Purna Karya
- PSAK 50 & 55 - Pengakuan dan pengukuran atas cadangan kerugian penurunan nilai



PENGAWASAN TERHADAP PROFESI AKTUARIS

PMK No.
137/PMK.01/2016
Tentang Aktuaris

Pemberian izin usaha, pembinaan, dan pengawasan perusahaan konsultan aktuarial

FUNGSI PENGAWASAN

Untuk meningkatkan kredibilitas profesi Aktuaris di mata pengguna jasa

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa dan profesi Aktuaris di Indonesia





**WILAYAH BIROKRASI
BERSIH & MELAYANI**



JADILAH INSPIRASI!
Mari Bersama Cegah Korupsi

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

Memberikan Penghargaan Kepada:

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat:

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 12 Desember 2017

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

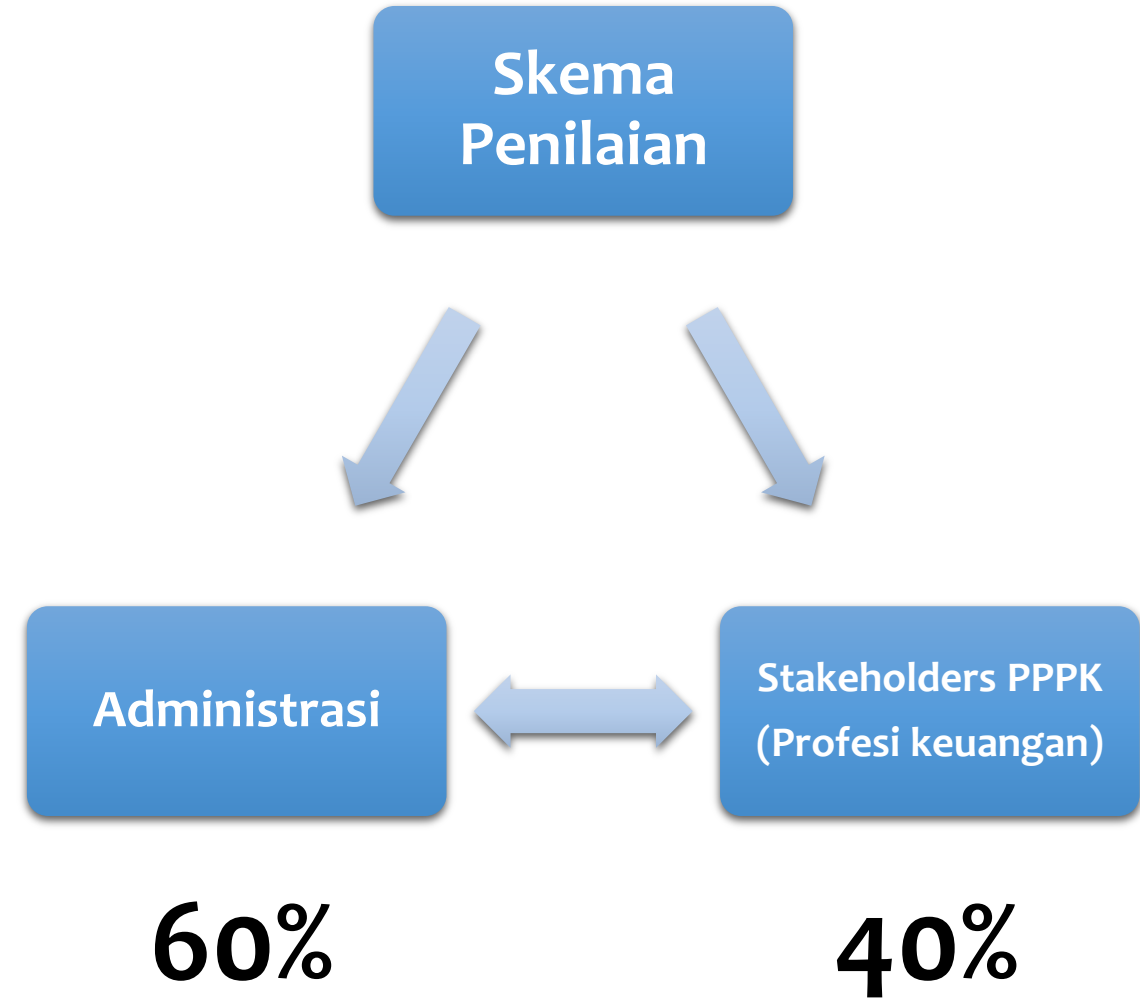
ASMAN ABNUR



WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI

WBK & WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada 2017, PPPK meraih Predikat Menuju WBK Tahun ini ditunjuk untuk mengikuti penilaian Predikat Menuju WBBM





**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

TERIMA KASIH

INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

**PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Gd. Djuanda II, Lt. 19-20

Jl. Dr. Wahidin No. 1

Jakarta Pusat 10710

Telp. : (021) 384 3237 (direct)

Fax. : (021) 350 8573

Email : pppk@kemenkeu.go.id

Aduan : lapor.pppk@kemenkeu.go.id

Website : www.pppk.kemenkeu.go.id